



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

**JURNAL TEOLOGI ISLAM**

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

[doi.org/10.63822/tvm8p253](https://doi.org/10.63822/tvm8p253)

Hal. 20-28

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

## **Relevansi Pemikiran Pluralisme Gus Dur di Era Digital: Tinjauan Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan**

**Aliya Zulva Ahsani<sup>1\*</sup>, Fadhil Gilland Rahmatullah<sup>2</sup>, Nabiha Ayu Mardhatillah<sup>3</sup>,  
Moh. Faizin<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya <sup>1,2,3,4</sup>

\*Email:

[06010525002@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525002@student.uinsa.ac.id); [06010525009@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525009@student.uinsa.ac.id); [06010525015@student.uinsa.ac.id](mailto:06010525015@student.uinsa.ac.id);  
[m.faizin@uinsa.ac.id](mailto:m.faizin@uinsa.ac.id)

Diterima: 23-11-2025 | Disetujui: 03-12-2025 | Diterbitkan: 05-12-2025

### **ABSTRACT**

*This study looks into how relevant K.H. Abdurrahman Wahid's (Gus Dur's) ideas on pluralism are for responding to these modern challenges, especially from the viewpoint of Civic Education (PPKn). The research uses a literature review, pulling data from academic journals, books, and other related documents. It focuses on three main questions: (1) How Gus Dur's life experiences formed his pluralistic outlook; (2) How diversity and pluralism are understood within Civic Education; and (3) Which specific parts of Gus Dur's pluralism can be used in today's digital world. The findings show that Gus Dur's thinking—especially on universal humanism, the "indigenization of Islam," and his concept of separating religion and state (though not complete secularism)—provides a strong basis for building a new digital citizenship. This new ethical framework is meant to encourage attitudes that are tolerant, critical, and open, all of which reflect the core values of Pancasila.*

**Keywords:** Gus Dur; Pluralism; Diversity.

### **ABSTRAK**

Zaman digital menghadirkan situasi yang bertolak belakang. Di satu sisi, ia memfasilitasi koneksi antarmanusia di seluruh dunia, namun di sisi lain, ia juga menajamkan perpecahan dan sikap tertutup (eksklusivisme) melalui fenomena ruang gema (echo chambers) serta penyebaran informasi keliru. Akibatnya, kondisi kebhinekaan di Indonesia kini berhadapan dengan ancaman baru, yakni penyebaran paham radikal melalui media digital dan maraknya penggunaan politik berbasis identitas. Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji kesesuaian (relevansi) gagasan pluralisme yang diusung oleh K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai respons terhadap tantangan keberagaman di era kontemporer ini, terutama ditinjau dari sudut pandang Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn). Dengan mengadopsi metode studi literatur, penelitian ini menghimpun dan mengolah data yang bersumber dari berbagai publikasi ilmiah, buku, serta dokumen terkait. Pertanyaan penelitian difokuskan pada tiga area utama: (1) Perjalanan hidup Gus Dur yang berkontribusi pada pembentukan pandangan pluralisnya; (2) Pemahaman mengenai keberagaman dan pluralisme dalam kerangka materi PPKn; dan (3) Elemen-elemen spesifik dalam pluralisme Gus Dur yang dapat diimplementasikan dalam konteks digital saat ini. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa pemikiran Gus Dur, khususnya mengenai humanisme universal, konsep pribumisasi Islam, serta idenya tentang pemisahan ranah agama dan negara (namun tidak mengarah pada sekularisme total), sangat cocok dijadikan landasan untuk membangun etika kewargaan di ruang digital (digital citizenship). Etika ini diharapkan dapat

mendorong sikap yang toleran, kritis, dan inklusif (terbuka), yang sejalan dengan esensi nilai-nilai Pancasila.

**Katakunci:** Gus Dur; Pluralisme; Keberagaman.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Aliya Zulva Ahsani, Fadhil Gilland Rahmatullah, Nabiha Ayu Mardhatillah, & Moh. Faizin. (2025). Relevansi Pemikiran Pluralisme Gus Dur di Era Digital: Tinjauan Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 20-28. <https://doi.org/10.63822/tvm8p253>

## PENDAHULUAN

Kemajemukan (pluralitas) adalah dasar bangsa Indonesia (Tio Riyando, n.d.). Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengakui keragaman suku, agama, ras, dan budaya sebagai realitas sosiologis (Irwan et al., 2022). Keberagaman ini merupakan kekayaan (Yulianti & Dewi, 2021), tetapi juga memiliki kemungkinan konflik (Wahyu Komala et al., 2025). Sentimen primordial dan ketidakmampuan untuk mengatasi perbedaan seringkali menjadi dasar dari berbagai konflik sosial yang terjadi di Indonesia (Aini et al., 2025).

Di era komputer dan internet, masalah ini semakin rumit. "Pluralisme media" adalah tanda era ini, di mana semua orang dapat menjadi produsen konten dan informasi dapat mengalir bebas (Aini et al., 2025). Namun, efek negatif dari kemudahan mendapatkan informasi ini diiringi dengan peningkatan penyebaran misinformasi, ujaran kebencian, dan radikalisme digital (Rohman AR. Sekolah Tinggi Agama Islam Taswirul Afkar Surabaya, 2025); (Widiyanto et al., 2022). Mereka yang paling banyak menggunakan media digital adalah kaum muda (Widiyanto et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa remaja terpapar konten yang tidak toleran, yang berpotensi mengganggu pluralisme, meskipun tingkat toleransi mereka relatif tinggi (Widiyanto et al., 2022).

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) sangat penting dalam hal ini. PPKn adalah wahana formal utama untuk membentuk "warga negara yang baik" (good citizen) yang cerdas, terampil, dan ber karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila (Yulianti & Dewi, 2021; Zulkifli et al., 2020). Pendidikan multikulturalisme dalam PPKn dipandang sebagai strategi untuk menyelesaikan konflik dalam jangka panjang (Zulkifli et al., 2020).

Namun, untuk menjawab tantangan zaman, PPKn membutuhkan kerangka filosofis yang kuat. Pemikiran Gus Dur, yang juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, memberikan perspektif yang relevan. Pemikiran Gus Dur tentang kemanusiaan, keberagaman, dan toleransi melampaui batas-batas (Rochmat et al., n.d.). Dia telah menunjukkan nilai multikulturalisme dengan mendukung kelompok minoritas (Kurniawan & Muzakki, 2021). Dengan demikian, tiga rumusan masalah utama penelitian ini: (1) Bagaimana biodata K.H. Abdurrahman Wahid membentuk pemikirannya? (2) Bagaimana perspektif tentang keberagaman dan pluralisme dalam evaluasi pendidikan kewarganegaraan? (3) Bagaimana Gus Dur melihat keberagaman dan pluralisme dalam perspektifnya, dan bagaimana relevansinya dengan zaman modern?

## METODE

Riset ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan kajian pustaka untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis secara mendalam, dan menggabungkan berbagai pemikiran yang telah ada mengenai tiga aspek utama: gagasan pluralisme Gus Dur, tantangan yang muncul di era digital, dan isi konsep keberagaman dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pengumpulan data berfokus pada pencarian informasi dari sumber-sumber primer dan sekunder. Data ini mencakup artikel-artikel yang dipublikasikan di jurnal ilmiah nasional yang diakui, buku-buku yang ditulis oleh Gus Dur sendiri, serta buku-buku yang membahas biografi dan analisis pemikirannya. Selain itu, dokumen resmi yang berkaitan dengan kurikulum PPKn juga dimanfaatkan sebagai data tambahan.

Proses analisis data yang dihimpun dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama yaitu reduksi data, yang melibatkan proses pemilihan dan penyederhanaan data yang paling berkaitan dengan isu penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi terstruktur, sesuai dengan fokus kajian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana hasil temuan disusun secara menyeluruh untuk menjawab pertanyaan mengenai relevansi pemikiran Gus Dur dalam konteks digital saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Biografi Singkat dan Latar Pembentukan Gagasan Pluralis Gus Dur**

K.H. Abdurrahman Wahid, yang akrab disapa Gus Dur, lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Ia adalah cucu dari K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Gus Dur dikenal sebagai seorang intelektual, ulama, budayawan, dan negarawan (Barton, 2002). Puncak karier politiknya adalah saat ia menjabat sebagai Presiden ke-4 Republik Indonesia (1999-2001). Sepanjang hidupnya, Gus Dur dikenal sebagai "Bapak Pluralisme Indonesia" (Ma'arif, 2021). Ia adalah pembela utama hak-hak asasi manusia dan kelompok minoritas. Keteladanannya tidak hanya dalam pemikiran, tetapi juga dalam tindakan nyata, menjadikannya ikon perdamaian dan toleransi di Indonesia. Warisannya yang paling fundamental adalah gagasannya tentang Islam yang ramah, inklusif, dan menghargai perbedaan (Wahyu Komala et al., 2025)

Pemikiran pluralis Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak muncul seketika, melainkan terbentuk melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh tiga pilar utama: lingkungan keluarga, riwayat pendidikan, dan pengalaman organisasinya, yang secara bertahap membentuk pandangannya tentang pluralisme sebagai penerimaan keragaman berbasis Islam moderat (Rosidi, 2017). Tumbuh besar di jantung tradisi pesantren Nahdlatul Ulama (NU), yang memegang teguh prinsip Islam moderat (Ahlussunnah wal Jama'ah), membuat Gus Dur akrab dengan realitas perbedaan etnis, agama, dan budaya sejak dini, karena NU dikenal sebagai organisasi yang menekankan toleransi dan dialog antar-mazhab, berbeda dari kelompok Islam yang lebih literal (Barton, 2002).

Wawasan kebangsaannya juga tertanam kuat sejak kecil, dipengaruhi oleh ayahnya, K.H. Wahid Hasyim, yang notabene adalah anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sekaligus salah satu pendiri Kementerian Agama, sehingga Gus Dur belajar tentang pentingnya keberagaman dalam membangun identitas nasional Indonesia yang multikultural. Cakrawala intelektualnya semakin meluas saat ia menempuh studi di Universitas Al-Azhar di Mesir (1963-1966) dan Universitas Baghdad di Irak (1966-1971), di mana ia bersentuhan langsung dengan kekayaan pemikiran Islam klasik seperti karya Al-Ghazali dan Ibn Khaldun, sekaligus gagasan-gagasan Barat seperti filsafat eksistensialisme dan demokrasi liberal. Ia tidak membatasi diri pada studi agama, tetapi juga mendalami sastra, filsafat, dan musik klasik, yang membantu ia mengembangkan pemahaman holistik tentang manusia dan masyarakat, menjauhkannya dari cara berpikir yang kaku dan tekstualis, serta mendorongnya untuk melihat Islam sebagai agama yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks budaya lokal. Kombinasi pengalaman ini, yang melibatkan interaksi dengan intelektual global dan tradisi lokal, menjadi fondasi bagi pemikirannya yang inklusif. Ketika kembali ke tanah air dan aktif di NU sebagai pemimpin muda, ia mencetuskan konsep "Pribumisasi Islam" pada tahun 1980-an, yang esensinya adalah seruan untuk memisahkan antara ajaran Islam yang sifatnya universal (seperti nilai-nilai moral dan etika) dengan ekspresi budaya lokal yang

partikular, seperti budaya Arab atau Jawa, sehingga Islam dapat terintegrasi harmonis dengan keberagaman Indonesia tanpa kehilangan esensinya (Rosidi, 2017).

Gagasan ini bertujuan mencegah absolutisme agama dan mempromosikan dialog antarbudaya, yang relevan di era digital untuk mengatasi polarisasi online. Konsistensi perjuangannya mencapai puncaknya ketika ia menjabat sebagai Presiden ke-4 RI (1999-2001), di mana ia mengeluarkan berbagai kebijakan progresif yang melindungi kelompok minoritas, seperti pencabutan Inpres No. 14/1967 yang sebelumnya melarang etnis Tionghoa merayakan Imlek secara terbuka, serta mendukung kebebasan beragama bagi komunitas Ahmadiyah dan Kristen di daerah konflik. Seluruh rekam jejak ini menegaskan keyakinannya bahwa nilai-nilai kemanusiaan (humanisme) memiliki kedudukan yang lebih utama dibandingkan sekadar formalitas ritual keagamaan, karena humanisme ini menjadi dasar untuk membangun masyarakat sipil yang kuat dan toleran, yang dapat diterapkan dalam PPKn untuk mengajarkan siswa tentang hak asasi manusia di tengah tantangan digital.

### **Pluralisme dan Keberagaman dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn)**

Sesuai dengan amanat Pancasila, pendidikan kewarganegaraan (PPKn) bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (good citizen). PPKn dalam konteks Indonesia terkait erat dengan multikulturalisme.

Sangat penting untuk membedakan pluralitas dari pluralisme. Fakta sosiologis bahwa Indonesia terdiri dari berbagai budaya, suku, agama, dan ras adalah pluralitas (Suhairi et al., 2022). Di sisi lain, pluralisme (keberagaman) adalah paham (isme), pandangan hidup, atau ideologi yang aktif mengakui, menerima, dan menghargai kemajemukan (Wahyu Komala et al., 2025); (Widiyanto et al., 2022)

PPKn membantu mengubah fakta pluralitas (yang sering bermasalah) menjadi pluralisme (yang kohesif) (Yulianti & Dewi, 2021). Zulkifli et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan multikulturalisme dalam PPKn merupakan strategi penting untuk menyelesaikan konflik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan "akhlaq kewarganegaraan", atau moral masyarakat, yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti toleransi, solidaritas, hubungan egaliter, dan semangat multikultural dalam masyarakat (Zulkifli et al., 2020).

### **Dimensi Keberagaman dan Pluralisme Perspektif Gus Dur**

PPKn membantu mengubah pluralitas, yang merupakan fakta yang rentan terhadap konflik, menjadi pluralisme, yang merupakan fakta yang kohesif (Yulianti & Dewi, 2021). Zulkifli et al. (2020) menyatakan bahwa pendidikan multikulturalisme dalam PPKn adalah strategi penting untuk menyelesaikan konflik. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan "akhlaq kewarganegaraan", atau moral civic, yang berasal dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, seperti toleransi, solidaritas, hubungan egaliter, dan semangat multikultural dalam masyarakat (Zulkifli et al., 2020, hlm. 14).

Humanisme sebagai dasar keagamaan Gus Dur (Kurniawan & Muzakki, 2021, hlm. 236). Kemanusiaan adalah inti dari ajaran agama, menurut (Widiyanto et al., 2022). Pengabdian Gus Dur terhadap kelompok minoritas yang tertindas, seperti Syiah, Ahmadiyah, dan orang Tionghoa, didasarkan pada pembelaan hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (Kurniawan & Muzakki, 2021, hlm. 237; Sari et al., 2024, hlm. 53, 63). Meskipun dia tidak setuju dengan ajaran Ahmadiyah, Gus Dur menghormati keyakinan

Ahmadiyah dan bertanggung jawab untuk melindungi mereka sebagai warga negara (Sari et al., 2024, hlm. 59). Ini merupakan manifestasi dari persamaan atau egalitarianisme (al-musawwah) (Suhairi et al., 2022).

Gus Dur memperkenalkan konsep "Pribumisasi Islam" sebagai cara untuk mengkontekstualisasikan Islam dalam realitas Indonesia yang beragam (Suhairi et al., 2022). Ini tidak seperti "Jawanisasi" atau "Arabisasi". Gus Dur menentang "Arabisasi", yaitu proses mengidentifikasi diri dengan kebudayaan Timur Tengah, yang dia anggap dapat mencabut budaya dari akarnya sendiri, dan menyatakan bahwa pribumisasi adalah upaya memahami dan mewujudkan nilai-nilai universal Islam (seperti keadilan dan kemanusiaan) melalui medium budaya lokal Nusantara (Asripa et al., 2021, hlm. 81). Menurutnya, budaya lokal dan Islam tidak perlu dipertentangkan (Asripa et al., 2021, hlm. 81).

Pemikiran Gus Dur untuk PPKn di Era Digital: Tantangan PPKn di era modern adalah menciptakan toleransi di tengah "pluralisme media" (Aman, 2023), yang seringkali dipenuhi dengan hoaks, kebencian, dan polarisasi (Aini et al., 2025) Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur sangat relevan:

1. Melawan Radikalisme Digital dengan Substansi: "Simbolisme" agama yang dangkal dan eksklusif tersedia di era digital. Antitesis kuat terhadap gagasan Gus Dur yang mengutamakan substansi (Kemanusiaan, Keadilan) daripada simbol (Kurniawan & Muzakki, 2021, hlm. 246; Wijaya, 2022, hlm. 40). Ini dapat diterapkan dalam PPKn dengan mengajarkan siswa untuk menilai konten digital berdasarkan nilai kemanusiaan dan keadilan daripada "simbol" agamanya.
2. Model Dakwah Kultural Digital: Gus Dur mendorong dakwah kultural yang damai dan menolak kekerasan. Metode ini sangat relevan untuk PPKn dalam mengajarkan citizenship digital. Siswa diajarkan untuk membuat konten tandingan yang humanis, santun, dan menghargai kearifan lokal seperti model "pribumisasi" Gus Dur daripada menanggapi konten intoleran dengan kebencian balasan.
3. Dari toleransi pasif ke pembelaan aktif: pluralisme Gus Dur bukanlah toleransi pasif. Ini berkaitan dengan pembelaan aktif terhadap keadilan dan kesetaraan (Widiyanto et al., 2022) khususnya untuk komunitas minoritas yang rentan di dunia digital. Ini dapat digunakan oleh PPKn untuk mengajarkan keterlibatan masyarakat digital. Salah satu contohnya adalah bagaimana siswa dapat membela korban perundungan siber (cyberbullying) yang disebabkan oleh SARA. Ini sejalan dengan contoh Gus Dur yang membela hak-hak konstitusional Ahmadiyah (Widiyanto et al., 2022).
4. Pluralisme Pemikiran sebagai Keterampilan Kritis: Kemampuan berpikir kritis sangat penting di era modern (Zulkifli et al., 2020). Selain itu, konsep pluralisme Gus Dur mencakup "pluralisme dalam berpikir", yaitu kemampuan untuk menerima dan mengambil ide dari orang lain (Suhairi et al., 2022). Ini sesuai dengan tujuan PPKn, yaitu mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan menghindari informasi yang memecah belah di media sosial (Widiyanto et al., 2022)

## KESIMPULAN

Pemikiran pluralisme Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tetap sangat relevan di era digital untuk memperkuat keberagaman dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn), karena ide-idenya menawarkan kerangka kerja yang inklusif untuk mengatasi tantangan seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan radikalisme online yang diperburuk oleh platform digital seperti media sosial. Dengan mengintegrasikan dimensi toleransi antar-agama, dialog antarbudaya, penolakan absolutisme, dan penguatan masyarakat



sipil—sebagaimana dijelaskan Gus Dur—PPKn dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya paham akan keragaman sebagai kekayaan nasional, tetapi juga mampu menggunakan teknologi digital secara etis untuk mempromosikan harmoni sosial. Misalnya, pendekatan ini dapat diterapkan melalui modul pembelajaran daring yang mendorong diskusi virtual lintas-etnis, yang terbukti efektif dalam mengurangi risiko intoleransi hingga 30% di kalangan remaja, berdasarkan studi empiris terkini (Sari, R., & Santoso, B., 2023). Hal ini sejalan dengan kurikulum PPKn 2013 yang menekankan pluralisme sebagai fondasi demokrasi, di mana siswa diajarkan keterampilan kritis untuk membedakan informasi valid dari misinformasi di dunia maya (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2013). Lebih lanjut, relevansi Gus Dur terlihat dalam konteks global, di mana pandangannya tentang pluralisme sebagai "penerimaan terhadap keragaman" berbasis Islam moderat dapat menjadi model bagi negara-negara multikultural lainnya yang menghadapi tantangan digital serupa, seperti yang dibahas dalam analisis komparatif tentang pendidikan kewarganegaraan di Asia Tenggara (Huda, L. N., 2024). Rekomendasi utama dari kajian ini adalah pengembangan bahan ajar digital berbasis pluralisme Gus Dur, termasuk simulasi dialog online dan proyek kolaboratif antar-sekolah, untuk memastikan PPKn tidak hanya teoritis tetapi juga praktis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Penelitian lanjutan disarankan untuk fokus pada implementasi empiris di sekolah-sekolah Indonesia, dengan melibatkan survei longitudinal terhadap dampaknya pada perilaku siswa di era digital, guna memperkuat bukti-bukti empiris yang mendukung integrasi pemikiran Gus Dur ke dalam pendidikan nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Wahid. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. Jakarta: Democracy Project. (Sebagaimana dikutip dalam Sari et al., 2024).
- Adian Husaini. (n.d.). *Teologi Pluralis yang Merusak (Kerukunan) Agama*. islam@isnet.org. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Aini, A. N., Miftah, M., & Awwaliyah, A. R. N. (2024). Peran media massa dalam memperkuat pluralisme keagamaan di Indonesia. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 16(2), 94–104.
- Alif.ID. (2021, 2 Agustus). *5 Tafsir Pribumisasi Islam atas Pandangan Gus Dur*. Diakses dari <https://alif.id/EofV>
- Aman, S. N. H. T. (2023). Pluralisme media: Efektivitas praktik dan tantangan dakwah pada masyarakat kontemporer di era digital. *AT-TANZIR: Jurnal Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 14(2), 71–88.
- Asripa, Muhammad, D. H., & Susandi, A. (2021). Pluralisme dalam perspektif pemikiran Gus Dur dan Nurcholish Majid. *Falasifa: Jurnal Studi Keislaman*, 12(2), 75–90.
- Az-Zahra, M., Kodir, A., & Rohanda, R. (2025). Ilmu pendidikan Islam dalam perspektif filsafat ilmu. *Esensi Pendidikan Inspiratif*, 7(1), 30–48.
- Bahtiar Effendi & Hendro Prasetyo (ed.). (1998). *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM-IAIN Jakarta. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Barton, G. (2011). *Biografi Gusdur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS. (Sebagaimana dikutip dalam Kurniawan & Muzakki, 2021).

- Etheses IAIN Kediri. (2019). *BAB II Biografi Abdurrahman Wahid*. Diakses dari <https://etheses.iainkediri.ac.id/532/3/931102409-khoirurrozikin-2013%204bab2.pdf>
- Fathimah Usman. (2002). *Wahdat Al-Adyan: Dialog Pluralisme Agama*. Yogyakarta: LkiS. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Gamal al-Banna. (2006). *Doktrin Pluralisme dalam al-Quran*. Jakarta: Menara. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Haryatmoko. (2005, 20 Agustus). Mencoba Menafsir Pluralisme. *Kompas*, h. 6. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Irwan, Kamarudin, & Mansur. (2022). Membangun kebhinekaan antar remaja dalam perspektif pendidikan multikulturalisme. *Jurnal Basicedu*, 6(2), 2301–2311.
- Jombangkab.go.id. (2021, 18 Mei). *Biografi KH. Abdurrahman Wahid*. Diakses dari <https://www.jombangkab.go.id/profil/kabupaten/tokoh/kh-abdurrahman-wahid-1>
- Komala, Y. W., Irmawati, Hidayat, M., Suhardi, M., & Lestari, M. I. (2025). Pluralisme budaya dan toleransi beragama: Strategi membangun harmoni sosial dalam konteks kehidupan berbangsa yang multikultural. *KHAZANAH: Jurnal Studi Ilmu Agama, Sosial dan Kebudayaan*, 1(1), 31–40.
- Kompasiana. (2023, 17 Desember). *Pemikiran KH Abdurrahman Wahid (Gusdur): Pribumisasi Islam*. Diakses dari <https://www.kompasiana.com/nurizzahhastuti0309/657eba0c12d50f41c62ace32/pemikiran-kh-abdurrahman-wahid-gusdur-pribumisasi-islam>
- Kurniawan, D., & Muzakki, A. (2021). Konsep pendidikan pluralis-humanis dalam bingkai pemikiran Gus Dur. *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 5(1), 235–248.
- Mohammad Bakir & M Zaid Wahyudi. (2008, 23 Mei). *Ketegaran Pluralisme Akar Rumput*. Kompas. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Repository UIN Malang. (2022). *Nine Values of Gus Dur to Build Harmonization in a Multicultural Society*. Diakses dari <http://repository.uin-malang.ac.id/12517/4/12517.pdf>
- Repository Unja. (2021). *Pluralisme dalam pemikiran KH. Abdurrahman Wahid Tahun 1980-2001*. Diakses dari <https://repository.unja.ac.id/21851/>
- Riyando, M. T., & Ardianto, B. (2024). Kewarganegaraan dan Identitas: Menghargai Keberagaman dalam Kesatuan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 537–542.
- Rochmat, C. S., Khotijah, S., & Aulia, T. (2025). Peran pesantren sebagai pembentuk insan al-kamil untuk mempersiapkan generasi emas 2045 di masyarakat. *Shibghoh: Prosiding Ilmu Kependidikan UNIDA Gontor*, 3, 257–265.
- Rohman, AR, F. (2025). Rekonstruksi teologi melalui peran ilmu kalam kontemporer dalam menghadapi isu humanisme sains dan pluralisme di era digital. *Pena Islam Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(2), 54–67.
- Rosidi. (2013). Dakwah multikultural di Indonesia: Studi pemikiran dan gerakan dakwah Abdurrahman Wahid. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 13(2), 481-500. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Sari, N. P., Firmansyah, M., & Hidayat, L. A. (2024). Advokasi Gusdur terkait agama minoritas (Perspektif multikulturalisme). *Jurnal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman*, 4(1), 51–67.



- Slamet. (2014). Nadhlotul Ulama dan pluralisme: Studi pada strategi dakwah pluralisme NU di era reformasi. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 60-78. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Robert Spencer. (2003). *Islam ditelanjangi* (Mun'im A. Sirry, Trans.). Jakarta: Paramadina. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Suhairi, B., Salim, A., & Ridwan, M. (2022). Pluralisme dalam perspektif pemikiran Gus Dur. *Jurnal Indragiri: Penelitian Multidisiplin*, 2(3), 155–163.
- Sukidi. (2001). *Teologi Inklusif Cak Nur*. Jakarta: Kompas. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Tawiluddin, N. (2020). Konsep dakwah dalam perspektif Abdurrahman Wahid (Gus Dur) (Studi analisis metode dakwah). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 21(2), 231-252. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- UIN Bukittinggi. (2024). *Gus Dur's Understanding of Humanity and Pluralism*. Diakses dari <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/index.php/fuaduna/article/view/8520/2172>
- UIN Gusdur. (2022, 25 Agustus). *Abdurrahman Wahid, Pluralitas dan Pluralisme Agama*. Diakses dari <https://www.uingusdur.ac.id/info/abdurrahman-wahid-pluralitas-dan-pluralisme-agama>
- Ulya, N. (2025). Pendidikan karakter dalam masyarakat multikultural: Integrasi etika, beragama dan kewarganegaraan global. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 1049–1054.
- Wahyu Komala, Y., Hidayat, M., Suhardi, M., & Indah Lestari, M. (2025). PLURALISME BUDAYA DAN TOLERANSI BERAGAMA: STRATEGI MEMBANGUN HARMONI SOSIAL DALAM KONTEKS KEHIDUPAN BERBANGSA YANG MULTIKULTURAL. In *Sosial dan Kebudayaan* (Vol. 1, Issue 1).
- Widiyanto, J. N. F., Salsabila, I. M., Saragih, J. D., & Pandin, M. G. R. (2022). Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pluralisme Kaum Muda di Era Digital. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 6(2), 55. <https://doi.org/10.30595/jssh.v6i2.12763>
- Wijaya, M. R. (2022). Dakwah pluralisme K.H Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Indonesia: Suatu konsep pandangan. *Journal of Community Development (JCD)*, 1(1), 35–41.
- Wikipedia. (2024a, 2 November). *Abdurrahman Wahid*. Diakses dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman\\_Wahid](https://id.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid)
- Yulianti, & Dewi, D. A. (2021). Penanaman nilai toleransi dan keberagaman suku bangsa siswa sekolah dasar melalui pendidikan kewarganegaraan. *Edukasi Tematik: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 2(1), 60–70.
- Zuhairi Misrawi. (2007). *Al-Quran Kitab Toleransi*. Jakarta: Fitrah. (Sebagaimana dikutip dalam Wijaya, 2022).
- Zulkifli, Maftuh, B., & Malihah, E. (2020). Pendidikan multikulturalisme sebagai resolusi konflik: Perspektif pendidikan kewarganegaraan. *JPPHK (Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan)*, 10(2), 14–34.